

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN
PENDAPATAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI
PROVINSI PAPUA TAHUN 2015-2021**

(Skripsi)

Oleh:

**WAHYUNI SAFITRI
NPM 2111021029**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2015-2021

Oleh

WAHYUNI SAFITRI

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia, terutama di Papua. Meskipun Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tingkat kemiskinan di wilayah ini justru memiliki angka tertinggi jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Papua. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik dengan model analisis regresi data panel dengan model terpilih *Fixed Effect Model* (FEM). Periode Tahun yang digunakan Tahun 2015-2021 dengan variabel bebas pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pendidikan dan variabel terikatnya adalah kemiskinan di Provinsi Papua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan, pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua, sedangkan ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Pendidikan, Papua, Regresi Panel

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, INCOME INEQUALITY AND EDUCATION ON POVERTY IN PAPUA PROVINCE 2015-2021

By

WAHYUNI SAFITRI

Poverty is a complex issue that remains a major challenge in development in Indonesia, particularly in Papua. Despite Papua's abundant natural resources, the poverty rate in this region is the highest when compared to other regions in Indonesia. This study aims to analyze the factors influencing poverty in Papua Province. The data used in this study are secondary data obtained from the Central Statistics Agency using a panel data regression analysis model with the selected Fixed Effect Model (FEM). The time period used is 2015-2021, with independent variables of economic growth, income inequality, and education, and the dependent variable is poverty in Papua Province. The results of this study indicate that the economic growth variable has a positive and significant influence, education has a significant negative influence on poverty in Papua Province, while the gini ratio has a non-significant negative effect on poverty in Papua Province.

Keywords: *Poverty, Economic Growth, Income Inequality, Education, Papua, Panel Regression*

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN
PENDAPATAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI
PROVINSI PAPUA TAHUN 2015-2021**

Skripsi

Oleh:

WAHYUNI SAFITRI

**Sebagai Salah Satu Syarat mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN
EKONOMI, KETIMPANGAN
PENDAPATAN DAN PENDIDIKAN
TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI
PAPUA TAHUN 2015-2021

Nama Mahasiswa : Wahyuni Safitri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2111021029

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.
NIP. 195603251983031002

MENGETAHUI
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

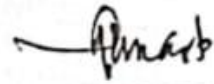


Dr. Arvina Ratih Y.T, S.E., M.M.
NIP. 198007052006042002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji
Ketua

: Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.



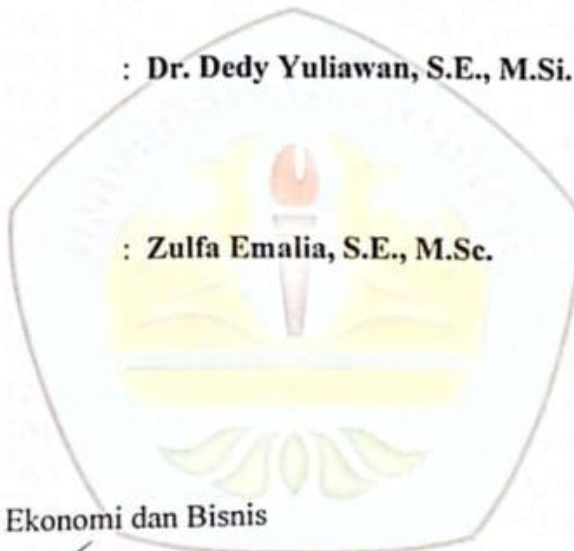
Penguji I

: Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.



Penguji II

: Zulfa Emalia, S.E., M.Sc.


_____

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **11 Juni 2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyuni Safitri

NPM : 2111021029

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Papua Tahun 2015-2021” telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Juni 2025
Penulis



Wahyuni Safitri

RIWAYAT HIDUP



Wahyuni Safitri lahir 04 November 2002 di Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Penulis merupakan anak sulung dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Agus Prianto dan Ibu Kuwati. Penulis memiliki adik yang bernama Ridwan Novian.

Penulis memulai bangku pendidikan di taman belajar pada Tahun 2008 di Paud Kasih Bunda. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SDN 1 Tanjungsari, Natar Tahun 2009-2015. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang menengah pertama di SMPN 3 Natar pada Tahun 2015-2018 dan melanjutkan ke jenjang menengah atas di SMAN 1 Natar, Lampung Selatan yang diselesaikan Tahun 2021. Selama berada di bangku sekolah penulis aktif dalam berbagai kegiatan sekolah seperti OSIS dan Pramuka. Penulis berkesempatan untuk mengikuti Olimpiade Siswa tingkat Kabupaten Tahun 2020.

Setelah lulus dari bangku sekolah penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tahun 2021 dengan konsentrasi pilihan ekonomi perencanaan. Penulis menjalankan perkuliahan dengan bantuan beasiswa KIP-Kuliah dari pemerintah. Selama berada di bangku perkuliahan penulis turut serta aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan. Di dalam kampus penulis aktif beberapa kegiatan kemahasiswaan antara lain menjadi sekretaris bidang kaderisasi FOSEIL ROIS FEB UNILA Tahun 2023 dan menjadi bendahara umum FORKOM BIDIKMISI/KIP-K UNILA Tahun 2024.

Diluar kampus menjadi member Kejar Mimpi Lampung dan mengikuti beberapa kegiatan sosial. Pada semester 5 penulis berkesempatan mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) ke IPB University dan mengikuti program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) sebagai fasilitator pendamping di Bank BTPN Syariah pada semester 6. Selain itu juga penulis melaksanakan program magang mandiri di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung selama 1 Bulan penuh. Penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada 2024 di Kampung Tangkas, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.”

-QS. Ar-Ra'd: 11

”Jika aku bisa melihat lebih jauh, itu karena aku berdiri diatas bahu para raksasa”

-Isaac Newton

“You Can If You Think You Can”

-Norman Vincent Peale

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

*Alhamdulillah rabbil'alam, dengan rasa syukur kepada Allah SWT.
atas segala rahmat dan hidayahnya serta teriring shalawatku kepada Nabi
Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati, sebagai tanda bakti dan rasa
terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada kedua
orang tuaku tersayang*

Agus Prianto & Kuwati

*Terimakasih kepada Papa & Mama yang telah senantiasa memberikan dukungan
baik moral maupun materi untuk prosesku hingga saat ini. Berkat didikan Papa &
kasih sayang Mama lah semuanya menjadi mungkin sehingga aku bisa sampai
pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Serta lantunan doa yang tak
pernah henti kalian berikan kepadaku hingga menjadi kekuatanku dalam
menghadapi segala tantangan dalam hidup.*

*Untuk Adikku, Ridwan Novian Terimakasih atas semua doa serta dukungannya
selama ini, terimakasih juga atas bantuannya sebagai penyemangat selama ini
dan seterusnya.*

Serta

Almamater tercinta

Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. yang maha pengasih dan maha penyayang karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2015-2022”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Saarljana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam Penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, sehingga tidak akan berjalan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arifina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi, dukungan, semangat serta ilmu dan saran yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
4. Bapak Muhammad Husaini, S.E., M.E.P. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi nasihat, bimbingan dan arahan kepada penulis sedari awal menjadi mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung hingga selesai.

5. Bapak Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. selaku dosen penguji yang senantiasa memberikan arahan, kritik dan saran serta dukungan serta bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc. selaku dosen penguji yang senantiasa memberikan arahan, kritik dan saran serta dukungan serta bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memebrikan ilmu dan wawasan yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama masa kuliah baik dari segi administrasi maupun sarana dan prasarana.
9. Teruntuk yang teristimewa kedua orangtuaku yang meskipun tidak pernah mengungkapkan tapi tidak pernah putus dalam memberikan doa, kasih sayang dan dukungan baik secara materi maupun moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara kandungku yang sudah supportif karena banyak membantu menjaga kewarasan selama berada dirumah dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
11. Sobat Info Cuaca yang tidak mau saya sebutkan Namanya terimakasih sudah saling memberikan semangat yang membara meskipun berbeda jurusan bahkan Universitas.
12. Omoo Genk yang tidak mau saya sebutkan Namanya yang sudah kebersamai sedari awal masa perkuliahan hingga masa perskripsian dengan penuh drama, canda, tawa hingga duka. Terimakasih atas saran dan masukan serta kebersamaan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Kance KKN "YUSRIL" dan keluarga besar Kampung Tangkas yang sudah memberikan banyak cerita baru bahkan menjadi tempat *healing* dan *refreshing* dikala huru hara skripsi melanda.
14. Rekan-rekan bimbingan Prof. Toto seperjuangan, terimakasih atas saran, masukan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi yang awalnya tidak saling tegur sapa hingga akhirnya bisa saling bertukar cerita.

15. Rekan-rekan organisasi yang telah memberi warna dan banyak cerita selama masa perkuliahan.
16. Teman-teman PMM asrama PPKU IPB University yang berbeda kampus bahkan pulau terimakasih banyak atas semangat yang telah di berikan, ilmu yang telah ditularkan, hingga pengalaman yang tak akan terlupakan.
17. Teman-teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas kerjasama, ilmu, pengalaman, canda tawa dan kebersamaan selama masa perkuliahan.
18. Terakhir untuk diriku sendiri Wahyuni Safitri, terimakasih atas perjuangan yang tidak mudah ini. Banyak rintangan yang membuatmu hampir jatuh dan masuk kedalam jurang tapi kamu memilih untuk tetap berjalan diatas tali yang tipis dan rapuh itu. Kurangi rasa takut itu dan jangan pernah berhenti dan berpuas diri atas hasil yang sudah digapai, terus tingkatkan *value* mu karena hidup akan terus berjalan maju.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap bahwa skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi pembaca. Semoga segala dukungan, bimbingan dan doa baik yang diberikan kepada penulis dapat kembali kepada pemberi dan mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Aamiin.

Bandar Lampung, 16 Juni 2025

Penulis

Wahyuni Safitri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Kajian Pustaka	13
2.1.1 Kemiskinan	13
2.1.2 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan	16
2.1.3 Ukuran Kemiskinan	18
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	21
2.1.5 Ketimpangan Pendapatan	22
2.1.6 Pendidikan	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Pemikiran	31
2.4 Hipotesis	33
III. METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis dan Sumber Data	34
3.2 Definisi Operasional.....	35
3.3 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
3.3.1 Model Estimasi Data Panel.....	37
3.3.2 Metode Pengujian Model Terbaik	39

3.3.3 Regresi Data Panel.....	40
3.4 Uji Asumsi Klasik	41
3.4.1 Uji Normalitas.....	42
3.4.2 Uji Multikolineritas.....	42
3.4.3 Uji Heteroskeditas.....	43
3.5 Uji Hipotesis Statistik.....	43
3.5.1 Uji t (Uji Parsial).....	43
3.5.2 Uji F (Uji Serentak)	44
3.5.3 Uji R^2 (Uji Koefisien Determinasi)	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Deskripsi Data	46
4.2 Hasil.....	49
4.2.1 Pengujian Model Terbaik.....	49
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	50
4.2.3 Regresi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	52
4.3 Pengujian Hipotesis	54
4.3.1 Uji t	54
4.3.2 Uji F	55
4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	56
4.5 Pembahasan	58
4.5.1 Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan	58
4.5.2 Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan	60
4.5.3 Pendidikan Terhadap Kemiskinan	61
V. SIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Simpulan.....	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perbandingan persentase penduduk miskin dengan jumlah penduduk miskin di Papua 2017-2021	5
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3. Definisi Operasional	35
Tabel 4. Deskripsi Statistik	47
Tabel 5. Hasil Uji Chow.....	50
Tabel 6. Hasil Uji Hausman	50
Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas	51
Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	52
Tabel 9. Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	52
Tabel 10. Hasil Uji t -statistik	54
Tabel 11. Hasil Uji F-statistik	55
Tabel 12. Koefisien Determinasi (R^2).....	56
Tabel 13. Hasil Analisis <i>Individual Effect</i>	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Indonesia berdasarkan Pulau Tahun 2023	3
Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Papua 2018-2022.....	5
Gambar 3. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Provinsi Papua Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2017-2021	7
Gambar 4. Rasio Gini Provinsi Papua Menurut Kabupaten/Kota 2013-2022	8
Gambar 5. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah di Papua dan Indonesia Tahun 2015-2022	10
Gambar 6. Lingkaran Setan Kemiskinan	17
Gambar 7. Kurva Lorenz.....	23
Gambar 8. Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 9. Hasil Uji Normalitas	53
Gambar 10. Peran PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua.....	59

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses perubahan yang direncanakan dan disadari oleh suatu bangsa atau negara untuk mencapai kondisi yang lebih baik disebut sebagai pembangunan. Sejalan dengan itu, Todaro dan Smith juga mengatakan seharusnya pembangunan bisa dianggap sebagai sebuah proses multidimensi yang melibatkan beberapa aspek perubahan yang mendasar di kehidupan sehari-hari baik dalam sikap masyarakat, struktur sosial, lembaga nasional, mempercepat pertumbuhan, dan dalam proses menanggulangi masalah kemiskinan (Todaro & Smith, 2011). Oleh karena itu, pembangunan bukan hanya berfokus terhadap pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan distribusi sumber daya yang lebih adil sebagai salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.

Kemiskinan adalah sebuah keadaan dimana ketika seseorang atau suatu pihak tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal sebagai tolak ukur tingkat kemakmuran ekonomi. Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan atas kehendak dan kerelaan setiap rumah tangga miskin. Istilah rumah tangga miskin bisa merujuk pada kebutuhan pokok, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kesehatan, kepemilikan harta benda, kurang memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang layak guna menunjang kelangsungan hidup (Jamil & Mat, 2019).

Kemiskinan seringkali dianggap sebagai bagian dari permasalahan pembangunan akibat dari pertumbuhan ekonomi wilayah yang tersebar secara tidak seimbang dan pada akhirnya memicu permasalahan baru berupa kesenjangan pendapatan antar wilayah akibat adanya liberalisme pembangunan (Sugiasuti & Pratama, 2022). Hal ini bisa terjadi karena akses masyarakat dalam mencari dan mendapat pekerjaan

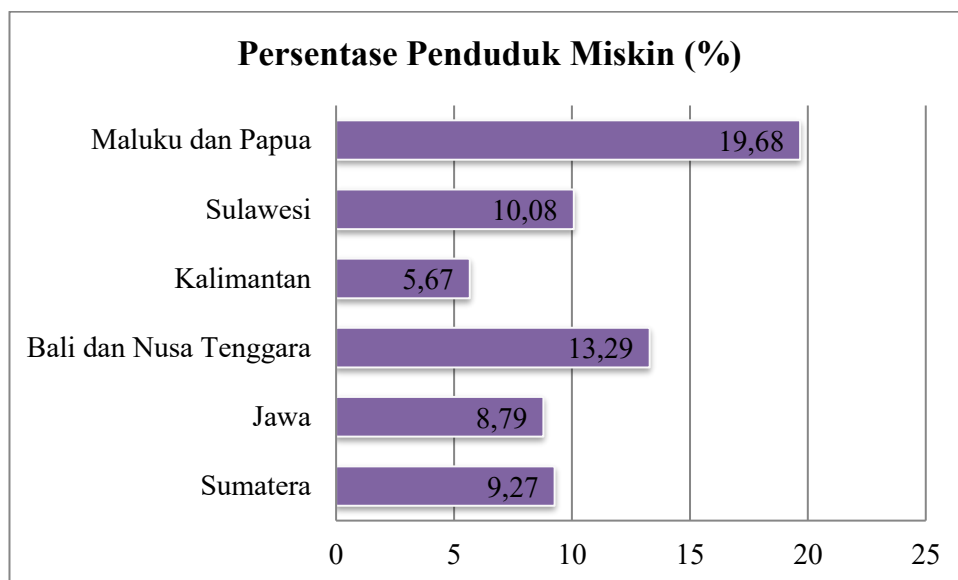
layak serta akses fasilitas umum. Akan tetapi jika masyarakat yang berada di daerah pedalaman dengan akses pembangunan yang minim tentunya akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya yang tentunya akan berdampak buruk terhadap banyak hal.

Kemiskinan sejatinya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah pola kepemilikan sumber daya yang tidak merata, yang berujung pada perbedaan pendapatan yang signifikan di masyarakat yang akhirnya menjadi cikal bakal munculnya kemiskinan tingkat mikro. Disamping itu, kemiskinan juga disebabkan oleh mutu sumber daya manusia yang berbeda, pendidikan dan nasib buruk serta perbedaan akses terhadap modal (Kuncoro, 2004).

Masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi isu serius di berbagai negara, bahkan negara maju sekalipun kemiskinan tetap menjadi perhatian penting. Pengentasan kemiskinan adalah satu diantara banyaknya tujuan utama dari pembangunan suatu bangsa (Sembiring et al., 2023). Fokus kajian saat ini seharusnya bukan hanya pada penyebab kemiskinan secara umum, tetapi juga harus turut serta dalam mengidentifikasi akar masalah yang melatarbelakangi kemiskinan itu sendiri (Kuncoro, 2004). Untuk itu, diperlukan kerjasama antar berbagai pihak baik pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif dalam pengentasan masalah kemiskinan agar tidak menjadi bola salju bagi generasi yang akan datang.

Indonesia merupakan satu dari banyaknya negara berkembang yang sampai saat ini berjuang melawan kemiskinan. Terdapat banyak sisi dari persoalan kemiskinan yang menjadikan masalah kemiskinan ini menjadi sangat rumit. Dilema kemiskinan bersifat multidimensional yang mana masalah yang ada dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bukan hanya menjadi domain bidang ekonomi saja, namun pula politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya (Adawiyah, 2020). Berbagai jenis kebijakan yang difokuskan pada pengentasan kemiskinan seharusnya bersifat menyeluruh, terintegrasi, serta mencakup seluruh dimensi kehidupan sosial masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan juga harus mempertimbangkan kondisi lokal dan karakteristik masyarakat agar kebijakan yang diterapkan dapat

memberikan dampak yang optimal. Selain itu, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan kerjasama Internasional, termasuk pemerintah, non-pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, serta masyarakat umum menjadi faktor kunci dalam menciptakan strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan (Sahara, 2023).



Gambar 1: Persentase Penduduk Miskin Indonesia berdasarkan Pulau Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

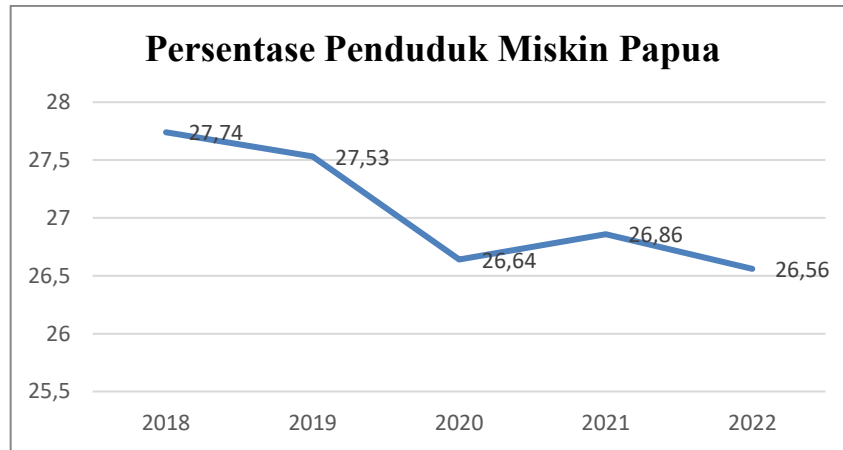
Fenomena kemiskinan di enam pulau di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin Indonesia berdasarkan Pulau Tahun 2023. Dengan tingkat kemiskinan 5,67 persen, Pulau Kalimantan memiliki tingkat kemiskinan terendah pada Tahun 2023. Pada tingkat kemiskinan sebesar 8,79 persen, Pulau Jawa memiliki tingkat kemiskinan terendah kedua pada 2023. Sebaliknya, dengan tingkat kemiskinan 19,68 persen pada 2023, Pulau Maluku dan Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan lima pulau lainnya.

Papua jika dilihat dari potensi sumber daya yang ada merupakan Pulau sekaligus Provinsi dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Didasarkan pada data yang diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat cadangan bijih emas yang signifikan di Papua yang hampir mencapai 1,9 miliar ton pada Tahun 2020, yang setara dengan sekitar 52% dari keseluruhan cadangan bijih emas secara nasional (Kementerian ESDM, 2020). Kekayaan sumber daya alam ini

menjadikan sektor pertambangan, khususnya emas, sebagai sektor unggulan yang berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua. Selain tambang, sektor pariwisata juga menjadi salah satu sektor unggulan di Papua. Raja Ampat yang mampu menjadi destinasi wisata andalan baik turis lokal maupun mancanegara karena menyajikan keindahan alamnya yang terkenal dengan gugusan pulau-pulau eksotis, keanekaragaman hayati bawah laut, serta budaya lokal yang unik menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata kelas dunia (Tampubolon et al., 2021).

Potensi sumber daya alam yang ada seharusnya mampu menjadi modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada kenyataannya pemanfaatan sumber daya ekonomi serta pengelolaan sumber daya alam merupakan tantangan utama dalam upaya pembangunan (Finanda & Gunarto, 2021). Hal ini yang dibuktikan dengan banyaknya potensi alam dan ekowisata di Papua tetapi tingkat kemiskinan di Papua masih sangat tinggi. Keadaan seperti ini yang mana dengan potensi yang melimpah menjadi pertanyaan besar mengapa Papua justru menjadi kawasan termiskin di Indonesia.

Kemiskinan yang tinggi di Papua disebabkan karena rendahnya tingkat industrialisasi dan keterbatasan akses masyarakat lokal terhadap pengelolaan sumber daya alam tersebut (Sanggrangbano, 2019). Sebagian besar industri pertambangan dan perkebunan masih dikelola oleh perusahaan besar yang berbasis di luar Papua, sehingga keuntungan ekonomi tidak banyak terserap oleh penduduk setempat. Faktor lainnya adalah ketimpangan dalam distribusi pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi yang belum merata. Investasi dan pembangunan infrastruktur yang terbatas di daerah-daerah tertentu mengakibatkan kesenjangan ekonomi antar wilayah, sehingga masyarakat di daerah terpencil atau kurang berkembang lebih rentan terhadap kemiskinan (Sukwika, 2018). Kondisi geografis yang menantang, seperti keterisolasian dan sulitnya akses transportasi, juga memperparah situasi dengan membatasi akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar (Sa'diyah & Irham, 2019).



Gambar 2: Persentase Penduduk Miskin Papua 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar. 2 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua 2018-2022 menunjukkan persentase kemiskinan Papua dalam kurun waktu 5 Tahun terhitung sejak 2018 hingga 2022. Dalam kurun waktu lima Tahun trend tersebut cenderung mengalami penurunan. Meskipun tidak signifikan, penurunan kemiskinan yang terjadi di Papua merupakan sebuah prestasi mengingat tantangan geografis yang menjadi salah satu penyebab kondisi sosial-ekonomi yang kompleks di wilayah tersebut. Papua memiliki medan yang sulit dijangkau karena topografi yang sangat bervariasi dan kondisi alam dengan resiko tinggi mengakibatkan keterbatasan dalam segala hal yang kemudian menjadi akar dari permasalahan kemiskinan di Papua.

Tabel 1. Perbandingan persentase penduduk miskin dengan jumlah penduduk miskin di Papua 2017-2021

Tahun	Persentase penduduk miskin (persen)	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)
2017	27,62	897,69
2018	27,74	917,63
2019	27,53	926,36
2020	26,64	911,37
2021	26,86	920,34

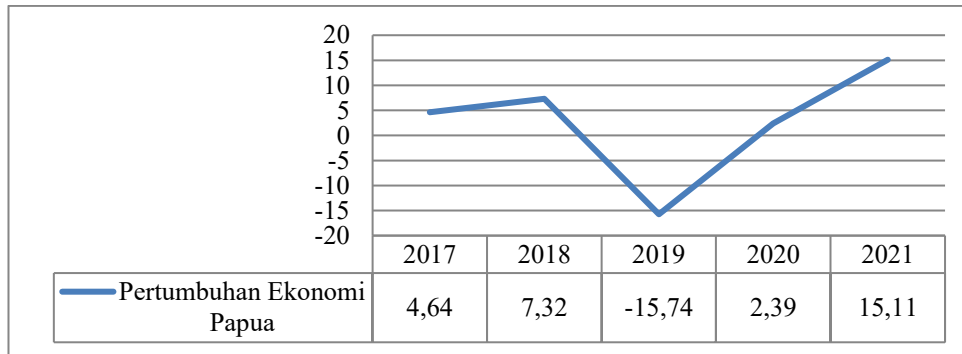
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Secara persentase penduduk miskin pada 5 Tahun terakhir berdasarkan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang dilihat berdasarkan Tabel 1. Perbandingan

Persentase Penduduk Miskin Dengan Jumlah Penduduk Miskin Di Papua 2017-2021 hampir sebagian besar mengalami penurunan berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin yang justru mengalami peningkatan. Rerata penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota apabila diamati pada Tahun 2017 dengan 2021 sebesar 0,91 poin. Sebaliknya, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di tingkat Kabupaten/Kota sebesar 0,79 poin antara Tahun 2017 hingga 2021 (Bappeda Provinsi Papua, 2022). Penurunan persentase kemiskinan yang disertai dengan peningkatan jumlah penduduk miskin dapat terjadi ketika jumlah total penduduk bertambah dengan cepat, pertumbuhan ekonomi tidak inklusif, serta adanya migrasi dan urbanisasi yang menambah jumlah penduduk rentan.

Keterbatasan dalam pembangunan akibat lokasi yang sulit dijangkau, pegunungan yang terjal, beberapa kawasan yang didominasi rawa, serta curah hujan tinggi membuat para pemangku kepentingan memerlukan waktu dan anggaran yang lebih tinggi dalam proses pengentasan kemiskinan dan tentunya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Shakira et al., 2024). Kondisi ini secara langsung berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi formal, yang pada akhirnya menghambat kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini menyebabkan sebagian besar pertumbuhan ekonomi di Papua didorong oleh sektor padat modal seperti pertambangan dan penggalian, yang meskipun menyumbang secara signifikan terhadap PDRB, namun tidak memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang luas terhadap ekonomi lokal.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi akhirnya menjadi bersifat eksklusif, terpusat pada sektor-sektor tertentu dan tidak mendorong keterlibatan masyarakat luas dalam kegiatan ekonomi produktif. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini berpotensi menciptakan stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah karena tidak didukung oleh pondasi sosial-ekonomi yang kuat di tingkat masyarakat akar rumput. Pertumbuhan ekonomi di Papua tidak hanya membutuhkan dorongan dari sektor makro, tetapi juga harus diimbangi dengan pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, agar pertumbuhan tersebut dapat bersifat inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 3. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Provinsi Papua Menurut Lapangan usaha (Persen) 2017-2021

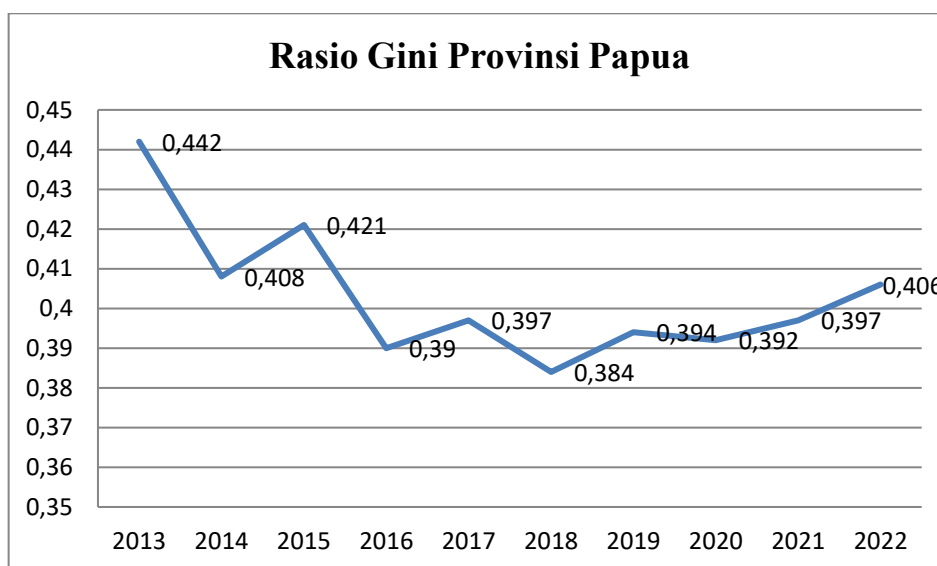
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Papua pada tahun 2021 tercatat sebesar 15,11%, meningkat tajam dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 2,39%, didorong oleh pelaksanaan PON XX dan Papernas XVI serta meningkatnya produksi tambang PT Freeport Indonesia pasca transisi dari tambang terbuka Grasberg ke tambang bawah tanah. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian (40,80%), diikuti konstruksi (7,04%) dan pengadaan listrik dan gas (5,77%), sementara beberapa sektor seperti jasa pendidikan (-4,64%), administrasi pemerintahan (-0,95%), dan industri pengolahan (-0,21%) mengalami kontraksi, yang mencerminkan dampak berkepanjangan pandemi COVID-19 (BPS Papua, 2022).

Meskipun pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2021 menunjukkan angka yang impresif, struktur pertumbuhannya masih belum inklusif, karena sangat bergantung pada sektor pertambangan yang bersifat padat modal namun rendah dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan tersebut belum secara optimal mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Ketika sektor-sektor produktif seperti pertanian, industri pengolahan, dan jasa pendidikan masih mengalami kontraksi, maka dampak pertumbuhan ekonomi menjadi tidak merata dan hanya terpusat pada sektor-sektor tertentu.

Di samping karena pertumbuhan ekonomi, masalah ketimpangan juga berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan. Ketimpangan ekonomi yang terjadi

menyebabkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja menjadi tidak merata. Akibatnya, kelompok masyarakat yang kurang mampu semakin sulit meningkatkan taraf hidup mereka. Jika ketimpangan ini tidak segera diatasi melalui kebijakan yang tepat, maka kesenjangan sosial akan semakin melebar dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.



Gambar 4. Rasio Gini Papua Menurut Kabupaten/Kota 2013-2022

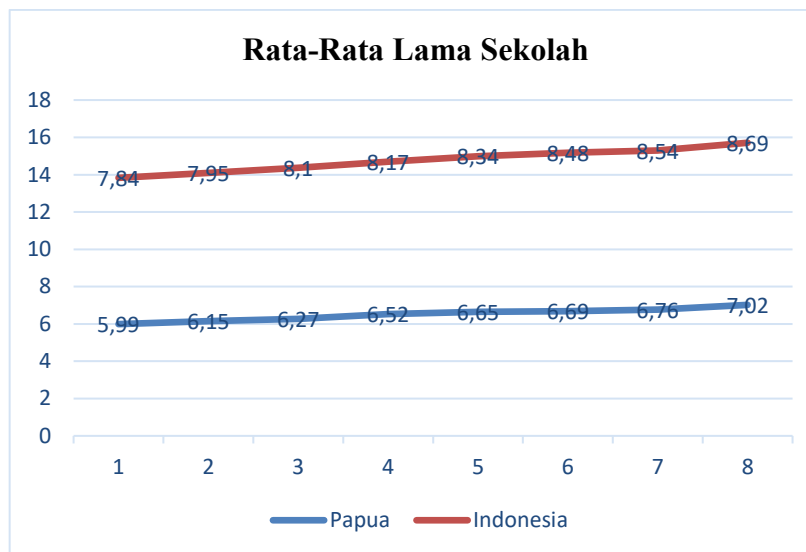
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pada gambar 3. Rasio gini Provinsi Papua menurut Kabupaten/Kota 2013-2022 diatas menunjukkan rasio gini pada Tahun 2010 hingga 2023 yang terjadi di Provinsi Papua. Secara umum, rasio gini di Papua mengalami fluktuasi, dengan tren penurunan pada 2013-2018 dan sedikit mengalami peningkatan pada 2019-2022. Ketika angka rasio gini berada diatas angka 0,3 hingga 0,5 masuk kedalam golongan ketimpangan moderat atau ketimpangan sedang. Rasio gini yang terjadi masuk dalam kategori sedang, hal tersebut karena tingkat kemiskinan Papua yang relatif tinggi. Rasio gini dipergunakan dalam pengukuran tingkat pendapatan pada suatu daerah atau wilayah secara keseluruhan. Penurunan pada rasio gini menunjukkan bahwa perbaikan pada pemerataan pendapatan, sedangkan peningkatan pada rasio gini menunjukkan bahwa kurangnya pemerataan pendapatan pada wilayah tersebut, sehingga hal tersebut harus adanya upaya pemerataan pendapatan yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat.

Beberapa penelitian mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa tingginya angka ketimpangan yang digambarkan dengan rasio gini mempunyai dampak terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh (Endrawati et al., 2023) menerangkan jika rasio gini memiliki pengaruh yang positif juga signifikan terhadap kemiskinan. Selain kebijakan yang secara langsung menyasar kelompok masyarakat miskin, upaya pemerataan infrastruktur turut berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Peningkatan aksesibilitas mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata antar wilayah. Infrastruktur yang memadai dapat memperkuat kapasitas masyarakat baik dalam hal kemampuan maupun peluang yang tersedia.

Penurunan pada rasio gini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pendapatan, sedangkan peningkatan rasio gini mengindikasikan ketimpangan yang semakin lebar. Kondisi ini menuntut adanya upaya dari pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi, salah satunya melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pendidikan yang lebih merata mampu meningkatkan rata-rata lama sekolah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Dengan tenaga kerja yang lebih terampil, peluang memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi, sehingga membantu mengurangi ketimpangan pendapatan di suatu wilayah.

Cara berpikir seseorang dalam menghadapi masalah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana wawasan yang dimiliki. Pendidikan menjadi fondasi utama dalam membentuk pengetahuan tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin luas pula peluang yang dimiliki individu untuk mencapai kesejahteraan hidup (Sarjito, 2024). Pendidikan memiliki peran krusial dalam menunjang peningkatan mutu sumber daya manusia, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan ekonomi baik pada tingkat individu maupun komunitas secara luas. Dengan memperluas akses serta memperbaiki mutu pendidikan, peluang untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi lebih besar, karena individu akan memiliki keterampilan yang lebih baik untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan efisiensi kerja mereka (Ansyori & Murwiati, 2025).



Gambar 5. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah di Papua dan Indonesia Tahun 2015-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pada Gambar 4. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah di Papua dan Indonesia Tahun 2015-2022 menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada 2015-2022 yang terjadi di Papua mengalami kenaikan pada setiap Tahunnya. Akan tetapi lamanya masa sekolah di Papua masih jauh berada dibawah rata-rata lama sekolah secara nasional. Secara umum, Papua menunjukkan tren positif dengan peningkatan RLS setiap Tahunnya, meskipun peningkatan tersebut belum terlalu signifikan. Namun demikian, hal ini tetap menunjukkan bahwa jenjang pendidikan masyarakat Papua semakin meningkat. Peningkatan ini dapat menjadi peluang strategis untuk mengentaskan kemiskinan melalui modal pendidikan yang lebih berkualitas. Dengan meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) seseorang dapat berdampak positif terhadap produktivitas atau kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan (Ayudia et al., 2024).

Hal serupa disampaikan juga oleh Jeffrey Sachs di dalam bukunya *The End of Poverty* dimana salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan dengan pengembangan *human capital* terutama pendidikan dan kesehatan (Sachs, 2005). Pendidikan pada penelitian ini diwakilkan oleh rata-rata lama sekolah. Dengan kata lain, konsep *human capital* menekankan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang secara tidak langsung

berdampak positif pada produktivitas kerja dan kesejahteraan ekonomi. Becker (1993) dalam (Handayani & Hanifa, 2024) menyatakan teori *human capital* bahwasannya sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan luas akan mempunyai peluang lebih dalam memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih banyak, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang masalah tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Papua pada Tahun 2015-2021?
2. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Papua pada Tahun 2015-2021?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Papua pada Tahun 2015-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Didasarkan pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Papua pada Tahun 2015-2021.
2. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua pada Tahun 2015-2021.
3. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua pada Tahun 2015-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Luaran dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat terkait luaran ilmu pengetahuan baru terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Papua bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu bisa memberikan gambaran dalam membuat dan menyiapkan program terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Papua. Selain itu, bagi masyarakat diharapkan mampu mendukung segala bentuk upaya dan program pemerintah dalam proses penurunan tingkat kemiskinan terutama di Papua.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kemiskinan

Penduduk dengan rerata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan adalah jumlah minimal biaya yang dibutuhkan untuk konsumsi makanan dan bukan makanan yang wajib dipenuhi supaya tidak dikategorikan miskin (BPS, 2023). Garis Kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan dasar yang mencakup pangan dan non-pangan, seperti halnya sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Komponen pangan biasanya diukur berdasarkan nilai energi minimum yang dibutuhkan, yaitu sekitar 2.100 kilokalori per kapita dalam satu hari, sedangkan komponen non-pangan disesuaikan dengan standar kebutuhan hidup di suatu wilayah. Jika rata-rata pengeluaran seseorang berada di bawah nilai tersebut, maka individu atau rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai miskin (BPS, 2025). Oleh karena itu, Garis Kemiskinan menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kemiskinan serta merancang kebijakan untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang terkait.

Terdapat dua konsep kemiskinan yang dikenal secara umum yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Selanjutnya kemiskinan absolut dibedakan atas 2 jenis yaitu (a) kemiskinan yang berkaitan dengan ketidakmampuan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar (b) kemiskinan yang berkaitan dengan ketidakmampuan dalam hal pemenuhan kebutuhan pada level yang lebih kompleks. Sementara itu, kemiskinan relatif yakni kemiskinan yang tidak memiliki batas kemiskinan yang jelas. Hal ini didasarkan pada perbandingan kesejahteraan individu dan kelompok. Kedua kerangka kemiskinan yang menempatkan

kepemilikan materi sebagai tolok ukur kelayakan hidup seseorang atau keluarganya. Istilah kemiskinan absolut dan relatif ini merujuk pada perbedaan sosial yang ada pada masyarakat berangkat dari konsep distribusi pendapatan, perbedaan utama antara kemiskinan absolut dan relatif terletak pada cara pengukurannya. Kemiskinan absolut ditetapkan berdasarkan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya, seperti angka konkret dalam bentuk garis kemiskinan atau indikator tertentu. Sementara itu, kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat kesejahteraan antar individu dalam masyarakat secara keseluruhan (Rahman et al., 2019).

Kemiskinan Absolut yang merujuk pada jumlah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengakses sumberdaya yang mempengaruhi guna memenuhi kebutuhan dasar mereka. Garis kemiskinan absolut bersifat universal yang tidak dibatasi oleh wilayah negara, tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan per kapita nasional dan mempertimbangkan variasi harga antar wilayah, dengan mengukur kemiskinan berdasarkan jumlah individu yang hidup di bawah batas pendapatan minimum yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kasus, kemiskinan absolut diukur berdasarkan jumlah individu atau per kapita. Garis kemiskinan ditetapkan pada level yang konstan atau tidak berubah secara steril sehingga memungkinkan untuk melihat perkembangan atau perubahan tingkat kemiskinan absolut secara konsisten dari waktu ke waktu (Todaro & Smith, 2011).

Strategi praktis dalam menetapkan garis kemiskinan absolut pada tingkat lokal yakni dengan cara mulai mengisi sebuah keranjang dengan makanan yang cukup, didasarkan pada prasyarat nutrisi dari penelitian medis yang berkenaan dengan jumlah kalori, protein, dan mikronutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya dengan memanfaatkan data survei rumah tangga lokal, dapat mengidentifikasi keranjang makanan yang biasanya dikonsumsi oleh rumah tangga yang nyaris tidak sanggup mencukupi asupan nutrisinya. Selanjutnya ditambahkan pengeluaran lainnya bagi rumah tangga ini seperti pengeluaran untuk pakaian, tempat tinggal, dan peralatan kesehatan untuk menentukan garis kemiskinan absolut pada tingkat lokal. Akan tetapi dalam banyak hal, sekedar menghitung jumlah orang yang berada di bawah ambang garis kemiskinan yang disepakati masih memiliki berbagai

kekurangan. Untuk itu, para ahli ekonomi berupaya menghitung jurang kemiskinan total atau *total poverty gap* yang mengukur total penghasilan yang dibutuhkan guna mengangkat setiap individu yang berada di bawah ambang garis kemiskinan hingga mencapai tingkat yang setara dengan garis tersebut.

Sekitar 1/3 dari orang miskin waktu tertentu miskin secara kronis (selalu miskin). Sementara 2/3 lainnya terdiri dari keluarga yang tergolong rentan secara ekonomi dan dapat menjadi miskin kapan saja. Keluarga rentan terhadap kemiskinan ini dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yakni keluarga yang biasanya miskin tetapi ada kalanya memperoleh pendapatan yang cukup untuk keluar dari garis kemiskinan dan keluarga yang biasanya tidak miskin tetapi terkadang mengalami guncangan yang membuat mereka jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Paling tidak terdapat 5 alasan utama yang menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak selalu berdampak negatif terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi. Pertama, kemiskinan yang semakin melebar memunculkan situasi dimana masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap pinjaman, tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak dan dengan mempunyai banyak anak dianggap sebagai jaminan masa tua karena tidak ada peluang untuk investasi dalam hal finansial. Kedua, kelompok elit ekonomi di sejumlah negara yang saat ini tergolong miskin cenderung tidak menabung atau menginvestasikan sebagian besar pendapatan ke dalam perekonomian lokal. Ketiga, penghasilan yang rendah dan rendahnya standar hidup di kalangan masyarakat miskin, yang berdampak negatif terhadap kondisi kesehatan, asupan gizi, dan akses pendidikan, dapat melemahkan produktivitas ekonomi mereka. Akibatnya, hal ini berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi. Keempat, peningkatan pendapatan di kalangan masyarakat miskin dapat mendorong permintaan terhadap produk-produk lokal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kelima, pengurangan kemiskinan secara besar-besaran dapat memperluas basis ekonomi yang sehat, karena menciptakan insentif baik secara materiil maupun psikologis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

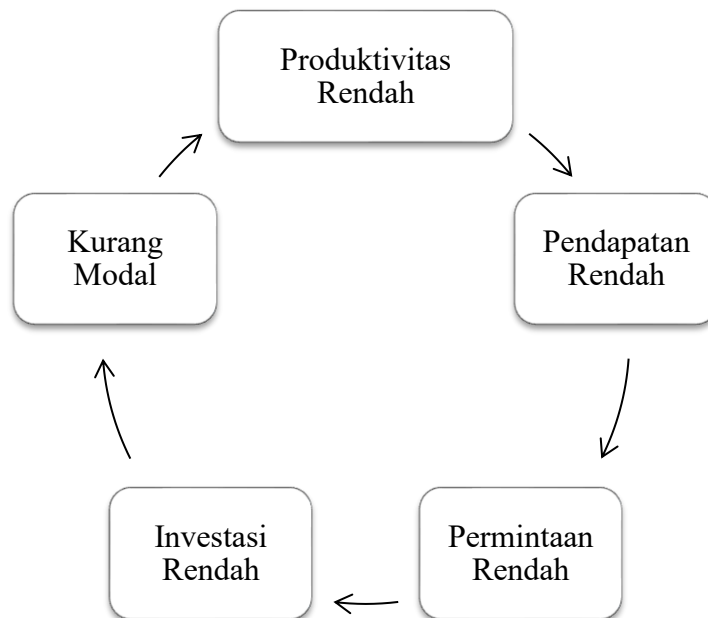
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dapat berjalan beriringan dan bukan merupakan hal yang saling berlawanan. Negara-negara dengan tingkat kemiskinan wilayah dengan penurunan tingkat kemiskinan tertinggi cenderung menunjukkan pola pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi ternyata tidak menjamin pengurangan kemiskinan.

2.1.2 Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

The Vicious Circle of Poverty atau lingkaran setan kemiskinan adalah teori yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953), menyebutkan bahwa kemiskinan bersifat struktural dan berulang, sebagaimana tercermin dalam pernyataan "*a poor country is poor because it is poor*" artinya suatu negara tetap berada dalam kondisi miskin karena memang sudah miskin (Lindrianti, 2022). Kemiskinan menyebabkan rendahnya produktivitas, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya pendapatan. Pendapatan yang minim menyulitkan masyarakat untuk berinvestasi dalam pendidikan maupun modal. Kemiskinan sendiri dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain pendapatan, pendidikan, dan konsumsi. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, sektor pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengalokasikan setidaknya 20% dari anggaran nasional maupun daerah untuk sektor ini, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 (Ratih et al., 2023).

Dalam kerangka teori ini, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi akar permasalahan kemiskinan. Pertama, pada tingkat makro kemiskinan timbul akibat ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Masyarakat miskin umumnya hanya memiliki sumber daya yang terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kedua, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia turut memperparah kondisi kemiskinan. Rendahnya kualitas SDM berdampak pada rendahnya produktivitas, yang kemudian mengakibatkan rendahnya pendapatan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah, kondisi sosial yang tidak menguntungkan, diskriminasi, maupun latar belakang keluarga turut menjadi penyebabnya. Ketiga, kesenjangan dalam akses terhadap modal juga menjadi penyumbang utama dalam siklus

kemiskinan ini. Secara keseluruhan, kondisi-kondisi tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu siklus kemiskinan yang berkelanjutan, sebagaimana dapat dijelaskan oleh (Subianto, 2019) melalui ilustrasi pada gambar berikut:



Gambar 6. Lingkaran Setan Kemiskinan

Keberlanjutan siklus kemiskinan ini menjadi tantangan besar dalam upaya pembangunan, terutama di negara-negara berkembang. Ketika pendapatan rendah menghambat potensi seseorang dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, maka potensi peningkatan kualitas hidup pun terhambat. Hal ini menciptakan hambatan struktural yang sulit ditembus tanpa adanya intervensi kebijakan yang holistik dan berkelanjutan. Untuk itu, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga harus mencakup perbaikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pembiayaan, serta penguatan kapasitas individu dan masyarakat. Intervensi yang bersifat lintas sektor sangat dibutuhkan untuk memutus rantai kemiskinan dan menciptakan mobilitas sosial yang lebih inklusif.

2.1.3 Ukuran Kemiskinan

Beragam indikator digunakan untuk menggambarkan kondisi dan dinamika penduduk miskin di Indonesia, yang penting untuk perencanaan, pemantauan, serta evaluasi berbagai program pengentasan kemiskinan. Indikator-indikator tersebut mencakup jumlah dan persentase penduduk miskin, serta karakteristik penting lainnya yang diamati dalam rentang waktu tertentu dan di berbagai wilayah geografis. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun bukan makanan. BPS menggunakan konsep pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu menghitung Garis Kemiskinan (GK) sebagai batas minimum pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup dalam mengukur kemiskinan disuatu wilayah. Garis Kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) didasarkan pada nilai pengeluaran untuk memperoleh kebutuhan konsumsi setara 2.100 kilokalori per kapita per hari, dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) mencakup kebutuhan lain seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Seseorang atau rumah tangga masuk kedalam kategori miskin jika total pengeluaran per kapita setiap bulannya di bawah garis kemiskinan (BPS, 2023).

BPS juga menggunakan beberapa indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan secara lebih mendalam, yaitu:

1. Persentase Penduduk Miskin (P0): Persentase penduduk miskin (P0) menggambarkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. P0 adalah ukuran dasar yang digunakan untuk melihat prevalensi kemiskinan dalam suatu wilayah. Dengan kata lain, P0 digunakan untuk melihat seberapa meluas masalah kemiskinan dalam suatu wilayah, yang membantu pengambilan kebijakan dan intervensi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1): Indeks ini mengukur sejauh mana rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Semakin dalam jurang kemiskinan, semakin tinggi nilai P1. Ini mencerminkan

"kedalaman" kemiskinan atau sejauh mana penduduk miskin dari garis kemiskinan sehingga membantu dalam memahami apakah orang yang miskin berada jauh atau dekat dari level kehidupan yang lebih baik, yang dapat memberi petunjuk untuk intervensi kebijakan yang lebih efektif.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2): Indeks ini mengukur ketimpangan di antara penduduk miskin. P2 menggambarkan seberapa parah ketimpangan pengeluaran penduduk miskin yang ada. Semakin besar P2, semakin besar pula perbedaan pengeluaran antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya.

Indeks P0, P1, dan P2 memberikan gambaran yang lebih mendalam tidak hanya jumlah penduduk miskin, akan tetapi memberikan gambaran terkait seberapa dalam dan parah kemiskinan yang dialami oleh kelompok miskin tersebut. Pendekatan ini dianggap relevan dan sistematis karena didasarkan pada standar nasional yang berlaku di Indonesia dan digunakan secara konsisten dalam survei sosial ekonomi penduduk.

Menurut Todaro (2011) dalam (Sinurat, 2023) kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif merupakan dua pendekatan dalam mengidentifikasi tingkat kesulitan ekonomi yang berbeda. Secara umum, kemiskinan absolut merujuk pada kondisi di mana sebagian besar masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan papan. Sementara itu, kemiskinan relatif muncul akibat ketimpangan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antar kelompok masyarakat.

Disamping itu, terdapat sejumlah indikator yang umum digunakan dalam mengukur atau menilai level kemiskinan. Menurut (Arsyad, 2016), empat indikator yang digunakan dalam pengukuran level kemiskinan, yaitu:

- a. Tingkat Konsumsi Beras

Salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan adalah tingkat konsumsi beras per kapita. Di wilayah pedesaan, individu yang mengonsumsi kurang dari 240 kilogram beras per kapita dalam setiap Tahun

dikategorikan sebagai miskin. Sementara itu, di kawasan perkotaan, ambang batasnya 360 kilogram per kapita dalam setiap Tahun.

b. Tingkat Pendapatan

Kemiskinan juga dapat diukur melalui analisis distribusi pendapatan. Ketimpangan dalam distribusi ini menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2011) terdapat dua ukuran pokok dari distribusi pendapatan, yaitu distribusi pendapatan perseorangan dan distribusi pendapatan fungsional. Distribusi pendapatan perseorangan umumnya digunakan untuk mengetahui berapa besar penghasilan yang diterima oleh masing-masing orang, tanpa memperhatikan sumber penghasilan tersebut. Dalam hal ini, para ahli ekonomi dan ahli statistik mengakumulasi seluruh pendapatan perseorangan dan membagi populasi ke dalam beberapa kelompok atau kelas pendapatan.

Ukuran distribusi pendapatan yang kedua yaitu distribusi pendapatan fungsional. Dalam ukuran ini titik fokusnya yaitu pada pendapatan nasional yang didapat oleh setiap faktor produksi. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui berapa persen pendapatan yang diterima oleh tenaga kerja, dan bagaimana perbandingannya dengan pendapatan yang diperoleh dari sumber lain seperti sewa, bunga, dan keuntungan.

c. Indikator Kesejahteraan Rakyat

Dalam salah satu publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1961 dengan judul *International Definition and Measurement of Levels of Living: An Interim Guide* disebutkan jika terdapat 9 komponen yang dipakai dalam mengukur kesejahteraan. Komponen-komponen tersebut terdiri dari kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan individu.

d. Indeks Kemiskinan Manusia

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) terdapat tiga indikator utama yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan yakni tingkat kehidupan, tingkat pendidikan dasar dan tingkat kemapanan ekonomi. Ketiga aspek

ini merepresentasikan dimensi penting dalam menilai sejauh mana masyarakat mengalami kekurangan dalam kebutuhan dasar dan akses terhadap pembangunan.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan dalam kemampuan suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa, yang ditandai dengan naiknya output nasional (Sukirno, 2019). Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output secara terus-menerus dalam jangka panjang yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (Todaro & Smith, 2020). Pertumbuhan ini mencerminkan seberapa besar kemampuan suatu wilayah atau negara dalam mengakumulasi modal, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan dinamis. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga sering dijadikan sebagai indikator utama dalam menilai efektivitas pembangunan ekonomi, karena menunjukkan keberhasilan pemerintah dan pelaku ekonomi dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional. Namun demikian, penting untuk memahami bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan perbaikan kesejahteraan secara menyeluruh apabila tidak disertai dengan pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata. Oleh karena itu, selain fokus pada angka pertumbuhan, kebijakan pembangunan juga perlu menekankan aspek keberlanjutan dan inklusivitas agar hasil pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam teori ekonomi neoklasik, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai hasil dari akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi (Mankiw, 2021). Model pertumbuhan ini berasumsi bahwa dengan peningkatan faktor-faktor produksi dan efisiensi, output total suatu negara akan meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pendekatan ini telah dikritik karena mengabaikan aspek distribusi hasil pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu disertai dengan penurunan kemiskinan apabila hasil dari pertumbuhan tersebut hanya terakumulasi di kelompok tertentu dalam masyarakat. Sejalan dengan kritik tersebut, beberapa teori pembangunan modern menekankan pentingnya

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan yang tidak inklusif seringkali menyebabkan ketimpangan pendapatan yang semakin lebar dan tidak memberikan efek pengganda yang optimal terhadap sektor-sektor lain dalam perekonomian. (Endrawati et al., 2023) menunjukkan bahwa di banyak wilayah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta menurunkan tingkat kemiskinan, terutama apabila sektor yang mendominasi pertumbuhan tidak menyerap tenaga kerja secara signifikan.

Lebih lanjut, (Auty, 1993) melalui teori *resource curse* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari sektor ekstraktif seperti tambang dan minyak sering kali tidak berkelanjutan dan cenderung menciptakan ketergantungan struktural terhadap komoditas primer. Kondisi ini menghambat diversifikasi ekonomi dan memperlemah integrasi antara sektor-sektor produktif dalam negeri. Oleh karena itu, keberhasilan pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa besar output meningkat, tetapi juga dari seberapa luas manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang inklusif yakni pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, menurunkan tingkat kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan antar kelompok sosial maupun wilayah.

2.1.5 Ketimpangan Pendapatan

Ukuran yang sangat sederhana dan ringkas mengenai tingkat relatif ketimpangan pendapatan penduduk salah satunya menggunakan rasio gini. Rasio gini adalah ukuran ketimpangan agregat dan bisa memiliki nilai berapapun, berkisar dari 0 (pemerataan sempurna) sampai 1 (ketimpangan sempurna). Koefisien gini atau *gini ratio*, dihitung secara grafis dengan membandingkan luas antara kurva lorenz dan garis distribusi pendapatan sempurna dalam diagram lorenz. Perbedaan ini menggambarkan tingkat ketimpangan. Semakin besar nilai koefisien gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien tersebut, semakin merata distribusi pendapatan antar penduduk. Menurut Oshima, nilai rasio gini terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, nilai rasio gini kurang dari 0,3 (ketimpangan rendah), nilai rasio gini antara 0,3 hingga 0,5 (kategori moderat), nilai rasio gini lebih dari 0,5

(ketimpangan tinggi) (BPS Yogyakarta, 2011). Secara matematis, rasio gini dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i (Q_1 + Q_{i-1})}{10.000}$$

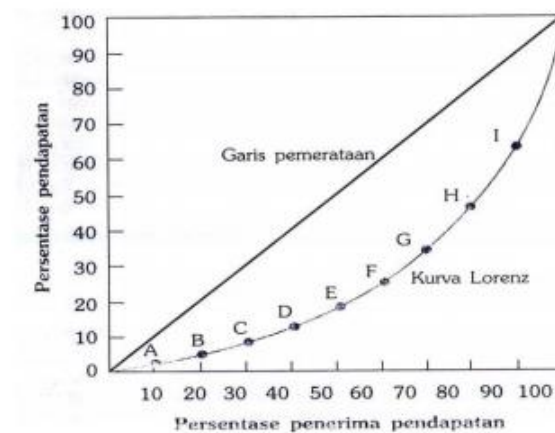
Keterangan:

P_i = Persentase penduduk pada kelas pengeluaran ke-i

Q_1 = Persentase kumulatif jumlah pengeluaran kelas pengeluaran ke-i

Q_{i-1} = jumlah kelas pengeluaran yang dibentuk

Rasio gini sering dipakai dalam studi mengenai distribusi pendapatan dan kekayaan karena mudah digunakan untuk menafsirkan kurva lorenz. Kurva lorenz menunjukkan korelasi kuantitatif yang konkret antara persentase penerima pendapatan dan persentase pendapatan total yang sebenarnya mereka peroleh selama periode tertentu.



Gambar 7. Kurva Lorenz

Berdasarkan kurva lorenz, terdapat sebuah garis diagonal yang ditunjukkan dengan garis yang menjulur dari titik awal di kiri bawah ke arah kanan atas dalam bujur sangkar. Setiap titik pada garis diagonal mencerminkan kondisi Dimana persentase total pendapatan yang diterima secara keseluruhan sebanding dengan jumlah

penerimanya, dimana distribusi pendapatan berada dalam keadaan merata sempurna. Untuk itu, garis diagonal tersebut disebut dengan garis pemerataan sempurna. Semakin jauh garis lorenz melengkung dari garis diagonal semakin besar tingkat ketimpangan yang terjadi. Semakin besar tingkat ketimpangan, kurva lorenz akan semakin melengkung dan semakin mendekati bagian bawah sumbu horizontal.

Ukuran agregat seperti rasio gini dapat digunakan untuk memutuskan perekonomian mana yang lebih merata. Rasio gini termasuk dalam salah satu indikator yang sesuai dengan empat kriteria utama yang diharapkan yakni anonimitas, independensi skala, independensi penduduk dan transfer. Prinsip anonimitas berarti bahwa ukuran ketimpangan tidak perlu bergantung pada siapa yang berpendapatan lebih tinggi. Artinya tidak perlu bergantung pada apa yang dipercaya sebagai manusia yang lebih baik, baik itu orang kaya ataupun orang miskin. Prinsip independensi skala berarti bahwa ukuran ketimpangan tidak perlu bergantung pada ukuran perekonomian atau cara kita mengatur pendapatannya. Prinsip independensi penduduk sedikit sama dengan prinsip sebelumnya, prinsip ini mengemukakan bahwa jumlah penerima pendapatan bukanlah dasar utama dalam menentukan tingkat ketimpangan.

Teori Kuznet menyatakan tahap awal pada pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat karena peralihan dari sektor agraris ke sektor industri menciptakan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan meningkatnya investasi dalam pendidikan, kebijakan redistribusi, serta pembangunan infrastruktur sosial, ketimpangan ekonomi akan mulai menurun. Dalam konteks kemiskinan, walaupun pertumbuhan ekonomi mampu mendorong peningkatan rata-rata pendapatan, tanpa kebijakan pemerataan yang tepat, kelompok miskin mungkin tidak langsung merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, negara dengan tingkat ketimpangan tinggi perlu menerapkan kebijakan yang mendorong inklusi ekonomi, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang lebih luas, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga membantu mengurangi kemiskinan secara keseluruhan (Kuznet, 1955).

2.1.6 Pendidikan

Pendidikan umumnya dijelaskan sebagai proses belajarnya individu guna mendapat pengetahuan lebih tinggi juga berkualitas. Individu/seseorang memperoleh pengetahuan secara formal melalui pendidikan yang telah di dapatnya. Pendidikan amat berguna pada upaya pembangunan ekonomi suatu negara, peningkatan kualitasnya sumber daya dapat terwujud dengan adanya pendidikan. Produktivitas kerjanya individu bisa menaikkan level penghasilan juga menghindari dari kata kemiskinan (Wulandari et al., 2022). Meningkatnya tingkat pendidikan, yang tercermin dari rata-rata lama sekolah, akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan daya saing, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan membantu menurunkan tingkat kemiskinan.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi kemiskinan. Pendidikan yang lebih tinggi dapat menjadi alat penting untuk mencegah seseorang terjerumus ke dalam kemiskinan (Aswin & Yasa, 2021). Individu dari kalangan miskin membutuhkan pendidikan yang memadai untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Namun demikian, akses ke pendidikan tinggi cenderung didominasi oleh kelompok masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi, karena keterbatasan finansial membuat masyarakat miskin kesulitan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang sekolah menengah atas atau bahkan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, pendidikan memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sayangnya, kemiskinan yang terus berlangsung menjadi penghalang utama dalam memperoleh pendidikan yang layak, terutama di tengah tuntutan dunia kerja modern yang semakin menekankan pada daya saing dan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi, serta kemandirian yang dibutuhkan oleh setiap warga negara. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), aspek pendidikan diukur melalui dua indikator: rata-rata lama sekolah dan tingkat melek huruf (AMH). Angka melek huruf dihitung berdasarkan persentase penduduk usia di atas 15 Tahun yang mampu membaca dan menulis dibandingkan dengan jumlah total penduduk dalam kelompok usia

tersebut. Menurut UNDP, angka ini berkisar antara 0 hingga 100, di mana nilai 0 mencerminkan ketidakmampuan total, sementara nilai 100 menunjukkan kemampuan literasi yang sempurna. Sementara itu, rata-rata lama sekolah mengacu pada total jumlah Tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh seseorang yang berusia lebih dari 15 Tahun dengan rentang pengukuran maksimal hingga lima belas Tahun.

Penerapan investasi yang adil dan merata di sektor pendidikan berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah dengan pendapatan rendah. Sebaliknya, kualitas pendidikan yang rendah dapat memberikan dampak negatif terhadap kemampuan masyarakat untuk berkembang, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan pendapatan (Surbakti et al., 2023). Latar belakang pendidikan seseorang mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatannya. Rata-rata lama sekolah suatu daerah dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikannya. Salah satu jenis sumber daya manusia yang menunjukkan kualitas SDM adalah pendidikan. Untuk mengoptimalkan kesenjangan antara proyeksi pendapatan dan perkiraan pengeluaran, tindakan terbaik bagi seseorang adalah melanjutkan pendidikan tinggi. Jika membandingkan besarnya biaya pendidikan dengan potensi pendapatan setelah lulusan memasuki pasar kerja, investasi pada sumber daya manusia akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan mulai bekerja penuh waktu di kemudian hari, namun pendapatan mereka akan meningkat lebih cepat dibandingkan mereka yang mulai bekerja lebih awal. Menurut Badan Pusat Statistik cara perhitungan rata-rata lama sekolah sebagai berikut :

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=0}^n xi$$

keterangan

RLS : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 Tahun ke atas

xi : Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 Tahun

n : Jumlah penduduk usia 25 Tahun ke atas

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat adalah melalui penerapan program wajib belajar 12 Tahun, yang ditujukan untuk memberikan kesempatan pendidikan hingga jenjang SMA, SMK, MA, atau sederajat (Khadafi et al., 2025). Lebih lanjut menurut Gary Becker (1964) dan Theodore Schultz (1961) dalam teori *human capital* berpendapat bahwa manusia bukan sekadar faktor produksi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat ditingkatkan melalui investasi dalam keterampilan dan pengetahuan. Dalam konteks kemiskinan, teori ini menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik lagi, dengan kompensasi yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, investasi dalam pendidikan juga berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi karena tenaga kerja yang lebih terampil cenderung lebih inovatif dan produktif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Wijayanti et al., 2024)	Analisis determinan kemiskinan di Provinsi Papua	Regresi linear data panel dengan <i>Fixed Effect Model</i>	Hasil penelitian ini menjelaskan PDRB dan TPT memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua. IPM dan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang ada di Provinsi Papua.

No.	Penelitian (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	(Haerusman & Khoirudin, 2023)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2022	Analisis kuantitatif dengan metode <i>Fixed Effect</i> <i>Model</i> (FEM)	Hasil penelitian ini menjelaskan secara simultan maupun parsial pengangguran, pendidikan, dan UMP memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. PDRB dan IPM memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.
3.	(Rahmadini et al., 2023)	Regresi Data Panel untuk Memodelkan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua	Analisis regresi data panel	Hasil penelitian ini menjelaskan jika rata- rata lama sekolah memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Papua pada Tahun 2018-2020.
4.	(Perwitasari et al., 2023)	Pengaruh Pendidikan, Pdrb, Dan Gini Ratio Terhadap	Metode analisis jalur	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya tingkat pendidikan, PDRB, dan Gini Ratio berpengaruh

No.	Penelitian (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Kemiskinan Di Sulawesi Selatan		negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan 2020- 2021.
5.	(Sari, 2021)	Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah	Analisis linier berganda dengan model <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	Penelitian ini menjelaskan upah minimum memiliki pengaruh yang negatif signifikan. Tingkat pengangguran terbuka serta jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kemiskinan yang ada di Jawa Tengah.
6.	(Shi & Qamruzzama n, 2022)	Re-Visiting the Role of Education on Poverty Through the Channel of Financial Inclusion : Evidence From Lower-Income and Lower- Middle-Income Countries	Metode yang digunakan <i>cross- sectional dependency test</i> (CDS), <i>panel unit root test</i> , <i>panel cointegration test</i> ,	Penelitian ini menjelaskan jika investasi pemerintah dalam pendidikan secara positif membantu pengentasan kemiskinan, yang menyiratkan hubungan negatif di antara keduanya.

No.	Penelitian (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<i>generalized methods of moment (GMM), dan sistem- GMM.</i>	
7.	(Endrawati et al., 2023)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia	Model regresi data panel	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan, rasio gini memiliki pengaruh yang positif signifikan dan variabel IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan Indonesia Tahun 2017-2022.
8.	(Triani & Sitorus, 2023)	The Influence of Human Development Index, Gini Ratio, Life Expectancy, and Economic Growth on Poverty in Aceh Province 2018-2022	Metode regresi data panel dengan model terpilih adalah REM	Hasil penelitian ini menjelaskan jika IPM memiliki pengaruh yang negatif serta signifikan terhadap koefisien. Rasio Gini dengan pengaruh positif signifikan; AHH tidak signifikan dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang

No.	Penelitian (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				negatif serta signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten dan kota di Provinsi Aceh.
9.	(Saleh & Rizkina, 2021)	Analisis Pengaruh Gini Ratio Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota Di Provinsi Aceh	Model panel ARDL	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gini ratio memiliki pengaruh yang negatif dan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Aceh.

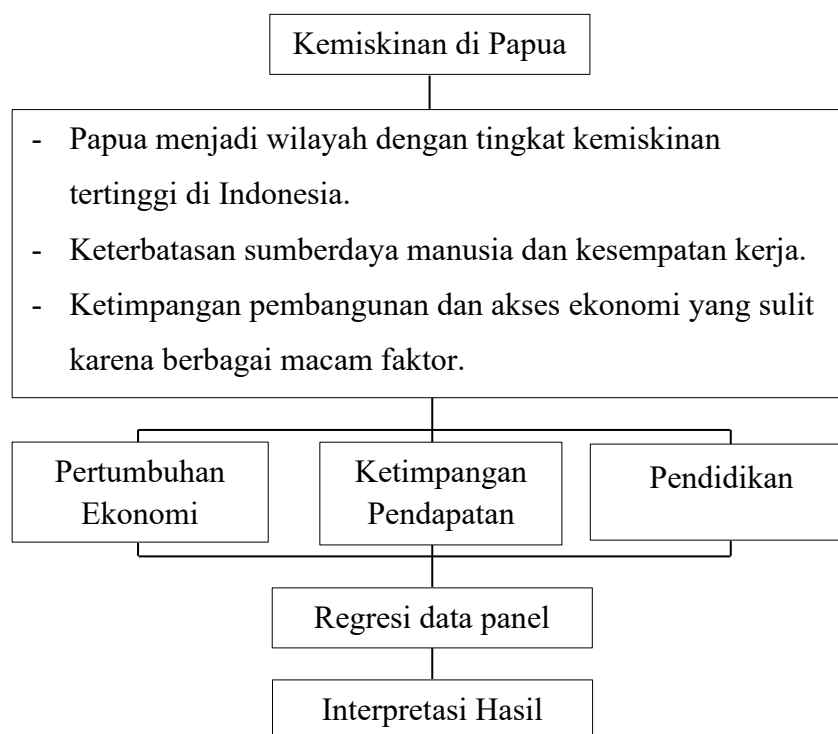
2.3 Kerangka Pemikiran

Dominikus Dolet Unaradjan (2019) dalam (Syahputri et al., 2023) menjelaskan bahwa kerangka pemikiran adalah dasar berfikir yang memuat perpaduan antara fakta dengan teori, kajian pustaka dan pengamatan yang nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, kerangka pemikiran dapat digunakan sebagai alat untuk menjawab dari permasalahan yang ada. Kerangka pemikiran dapat disajikan dengan bagan yang menggambarkan alur berfikir seorang peneliti dan hubungan antar variabel.

Penelitian ini membahas terkait kemiskinan yang mana merupakan permasalahan kompleks yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia, terutama di Papua. Meskipun Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tingkat kemiskinan di wilayah ini justru memiliki angka tertinggi jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Ini merupakan akibat dari beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat industrialisasi, keterbatasan

infrastruktur, dan akses yang terbatas terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Ketimpangan ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi ini, di mana keuntungan dari sektor unggulan, seperti pertambangan dan pariwisata, belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh minimnya kualitas sumber daya manusia yang ada. Sehingga melimpahnya sumber daya alam yang ada justru dikuasai oleh pihak dari luar.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai sektor. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dengan melibatkan masyarakat lokal dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang lebih merata, seperti akses transportasi dan fasilitas publik, dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat Papua untuk bisa mengatasi permasalahan ekonomi yang ada. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup fluktuatif namun relatif positif pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pertumbuhan yang terjadi bersifat inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi kunci dalam memberdayakan sumber daya manusia agar lebih kompetitif di dunia kerja.



Gambar 8. Kerangka pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan studi empiris, teori dan juga permasalahan yang terjadi. Maka bentuk hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Papua Tahun 2015-2021.
2. Diduga ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Papua Tahun 2015-2021.
3. Diduga pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Papua Tahun 2015-2021.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian kuantitatif dengan angka statistik dalam proses mengumpulkan dan menganalisa datanya (Sugiyono, 2008). Sifat dari penelitian ini yakni deskriptif kuantitatif dengan jenis data yang digunakan yakni data sekunder dalam bentuk data panel. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan jenis penelitian yang memiliki tujuan dalam menggambarkan faktor-faktor dan karakteristik dari suatu populasi secara sistematis, akurat, dan merinci. Penelitian ini berupaya memberikan gambaran mendalam tentang fenomena tertentu melalui tahapan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif (A.Muri Yusuf, 2017).

Data sekunder adalah data yang telah dikeluarkan oleh sebuah badan resmi, jurnal-jurnal terkait serta sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini. Data penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik. Data panel adalah data penelitian gabungan dari data *time series* dengan menggunakan rentang waktu Tahun 2015-2021 dan data *cross section* menggunakan 29 Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Dengan demikian, data panel berisi pengamatan terhadap banyak unit (misalnya individu, perusahaan, negara, atau daerah) yang dilakukan secara berulang selama periode waktu tertentu. Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Papua yang digambarkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua.

3.2 Definisi Operasional

Tabel 3. Definisi Operasional

Variabel	Satuan	Sumber Data
Kemiskinan	Persen	BPS Papua
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	BPS Papua
Ketimpangan Pendapatan	Skala	BPS Papua
Pendidikan	Tahun	BPS Papua

Variabel penelitian merupakan karakteristik, atribut, atau nilai objek yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diamati lebih lanjut agar dapat disimpulkan pada akhir analisis. Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kemiskinan

Variabel kemiskinan didefinisikan secara operasional sebagai kondisi ekonomi masyarakat yang ditunjukkan oleh persentase penduduk miskin di Provinsi Papua. Persentase kemiskinan mengacu pada proporsi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk, sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Garis kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan minimum konsumsi makanan maupun non-makanan yang diperlukan untuk hidup layak. Satuan yang digunakan dalam menghitung persentase penduduk miskin adalah persen.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Variabel pertumbuhan ekonomi didefinisikan secara operasional sebagai peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah, yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Papua. Pertumbuhan ini mencerminkan perubahan persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dari tahun ke tahun. Indikator pertumbuhan ekonomi yang digunakan mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik yang dihitung berdasarkan perbandingan PDRB riil (harga konstan) antar

tahun. Satuan yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah persen.

3. Ketimpangan Pendapatan

Variabel ketimpangan pendapatan dioperasionalkan menggunakan rasio gini. Rasio gini dinyatakan dalam skala 0-1, di mana nilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata (setiap individu memiliki pendapatan yang sama), sedangkan nilai 1 mengartikan ketimpangan sempurna (seluruh pendapatan dikuasai oleh satu individu). Data rasio gini diambil dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yang menghitungnya berdasarkan distribusi pengeluaran per kapita. Nilai rasio gini yang tinggi menunjukkan distribusi pendapatan dalam masyarakat yang semakin timpang yang secara tidak langsung juga dapat memengaruhi tingkat kemiskinan, stabilitas sosial, dan pemerataan pembangunan.

4. Pendidikan

Variabel pendidikan dioperasionalkan menggunakan indikator rata-rata lama sekolah, yaitu jumlah Tahun rata-rata yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 Tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal, baik di jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Data ini diambil dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan Tahun.

3.3 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penggunaan teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis regresi. Analisis regresi merupakan analisis yang mempelajari mengenai bergantungnya suatu variabel pada variabel lain (variabel bebas) yang mempunyai tujuan untuk mengestimasi populasi dari variabel yang sudah diketahui sesuai dengan nilai tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model regresi data panel, yaitu gabungan antara runtut waktu (*time series*) dan data antar tempat (*cross section*). Data *cross section* merupakan data yang dihimpun dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Data *cross section* yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah yaitu 29 Kabupaten/Kota di Papua. Sedangkan data *time series* merupakan data yang

dihimpun berdasarkan observasi dalam rentan waktu tertentu, data *time series* yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah data dari Tahun 2015- 2021.

3.3.1 Model Estimasi Data Panel

Terdapat tiga pendekatan untuk dapat mengestimasi model regresi terbaik jika suatu penelitian menggunakan regresi data panel, diantaranya:

1. *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model merupakan teknik paling sederhana yang digunakan dalam mengestimasi data panel. Hanya dengan menggabungkan data *cross section* dan *time series* tanpa melibatkan hubungan antar waktu dan individu. metode ini menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS) atau yang biasa dikenal dengan metode kuadrat paling kecil untuk mengestimasi data panel. Akan tetapi, pendekatan ini mempunyai kelemahan yaitu pada parameter β akan menjadi bias karena CEM tidak dapat melihat perbedaan antara observasi dan periode yang berbeda.

Berikut adalah persamaan untuk *Common Effect Model*:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = Variabel Dependen Unit i Waktu ke-t

β_0 = Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_n$ = Koefisien Regresi

X = Variabel Independen

i = Lokasi Pengamatan

t = Tahun Pengamatan

ε = Standard Error (*residual*)

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Asumsi yang digunakan dalam *Fixed Effect Model* bahwasannya intersep berbeda antar individu, sedangkan slopenya tetap sama antar individu. Dalam mengestimasi data panel dengan *Fixed Effect Model* maka

dibutuhkan adanya penggunaan variabel *dummy* digunakan untuk menjelaskan perbedaan intersep antar unit observasi. Model estimasi semacam ini umum dikenal dengan sebutan *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).

Berikut adalah persamaan untuk *Fixed Effect Model*:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

- Y_{it} = Variabel Dependen Unit i Waktu ke-t
- α_i = Intersep khusus untuk setiap entitas
- $\beta_1, \beta_2, \beta_n$ = Koefisien Regresi
- X = Variabel Independen
- i = Lokasi Pengamatan
- t = Tahun Pengamatan
- ε = Standard Error (*residual*)

3. *Random Effect Model* (REM)

Adanya variabel *dummy* yang ada dalam model *fixed effect* upaya untuk menggambarkan ketidaktahuan terhadap model yang sebenarnya melalui pendekatan tertentu berimplikasi pada menurunnya *degree of freedom* atau derajat kebebasan dalam analisis yang akhirnya dapat berpengaruh terhadap berkurangnya efisiensi parameter. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan variabel gangguan atau *error terms* yang dikenal dengan *random effect model*. Keuntungan dengan menggunakan model ini tentunya akan menghilangkan masalah heterokedastisitas.

Berikut adalah persamaan untuk *Random Effect Model*:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + u_i + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

- Y_{it} = Variabel Dependen Unit i Waktu ke-t
- β_0 = Intersep khusus untuk setiap entitas
- $\beta_1, \beta_2, \beta_n$ = Koefisien Regresi

X	= Variabel Independen
i	= Lokasi Pengamatan
t	= Tahun Pengamatan
u_i	= efek acak dari masing-masing unit
ε	= Standard Error (<i>residual</i>)

3.3.2 Metode Pengujian Model Terbaik

A. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk mengetahui model pendekatan terbaik mana yang akan digunakan antara *fixed effect* dan *common effect* yang diidentifikasi dengan menggunakan uji Chow yang menggunakan nilai distribusi statistik F sebagai acuan. Berikut hipotesis yang digunakan:

H_0 : *common effect model*

H_a : *fixed effect model*

Apabila hasil Uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih rendah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0,05) atau $\text{Prob} < \alpha = 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwasannya H_0 ditolak dan H_a diterima serta disimpulkan bahwa bahwa model yang seharusnya digunakan adalah *fixed effect model*, namun apabila nilai probabilitasnya lebih dari nilai signifikansi (0,05) atau $\text{Prob} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima sehingga model yang terpilih adalah *common effect model*.

B. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk mengetahui model pendekatan terbaik yang akan digunakan antara *random effect* dan *fixed effect* diidentifikasi dengan uji Hausman yang menggunakan *Chi-Square* statistik sebagai acuan. Berikut hipotesis yang digunakan:

H_0 : *Random effect model*

H_a : *fixed effect model*

Jika hasil dari Uji Hausman menunjukkan nilai dari probabilitas yang lebih kecil dari nilai signifikansi (0,05) atau $\text{Prob} < \alpha = 0,05$ dapat dinyatakan bahwasannya H_0 ditolak dan terima H_a serta disimpulkan bahwa bahwa model yang tepat untuk digunakan adalah *fixed effect model*. Akan tetapi, apabila hasil probabilitasnya lebih besar dari 0,05 atau $\text{Prob} > \alpha = 0,05$ maka H_a ditolak sehingga model yang terpilih *random effect model*.

C. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji ini digunakan untuk mengetahui model pendekatan terbaik antara *common effect* dan *random effect* diidentifikasi dengan uji Lagrange Multiplier yang menggunakan *Chi-Square* statistik sebagai acuan. Uji signifikansi *random effect* ini dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Berikut hipotesis yang digunakan:

H_0 : *Common effect model*

H_a : *Random effect model*

Jika hasil dari Uji LM terlihat nilai probabilitasnya lebih kecil dari signifikansi (0,05) atau $\text{Prob Breusch-Pagan} < \alpha = 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima serta disimpulkan bahwa bahwa model yang tepat untuk digunakan dalam suatu penelitian adalah *random effect model*, namun apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari signifikansi (0,05) atau $\text{Prob Breusch-Pagan} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima sehingga model yang terpilih yakni *common effect model*.

3.3.3 Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel yaitu model regresi yang menggabungkan observasi data *time series* dengan data *cross section*. Penggunaan data panel memberikan berbagai keuntungan, salah satunya adalah fleksibilitas yang lebih tinggi serta kemampuan untuk menangani permasalahan yang timbul akibat variabel yang hilang. Dalam penelitian ini, data panel yang digunakan mencakup data *cross section* dari 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan data runtut waktu (*time series*) selama periode 8 Tahun yaitu dari Tahun 2015-2022.

Model ekonomi kemiskinan digambarkan sebagai berikut:

$$KM = f(PE, KP, PD)$$

Spesifikasi model yang digunakan dalam model penelitian ini memodifikasi model penelitian yang digunakan (Perwitasari et al., 2023):

$$KM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 KP_{it} + \beta_3 PD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

KM	= Kemiskinan
PE	= Pertumbuhan Ekonomi
KP	= Ketimpangan Pendapatan
PD	= Pendidikan
β_0	= Konstanta atau intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
i	= Lokasi Pengamatan (Provinsi Papua)
t	= Tahun Pengamatan (2015-2021)
ε	= Standard Error (<i>residual</i>)

3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi dasar yang mendasari model regresi linear ini. Model terbaik adalah model yang memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Sebuah model bisa dikatakan BLUE apabila model regresi berbentuk linear dalam parameter, ekspektasi residual nol, varians residual konstan, tidak terjadi autokorelasi dan tidak ada multikolinearitas. Jika asumsi ini terpenuhi, maka estimasi parameter yang diperoleh dari OLS adalah yang paling efisien, artinya memiliki varians paling kecil dibandingkan dengan estimator lainnya yang juga tidak bias.

Dalam analisis data panel, pengujian asumsi klasik memang tidak selalu diperlukan dengan cara yang sama seperti pada regresi data *cross section* atau *time series*. Hal ini karena data panel menggabungkan dimensi *cross section* dan *time series*,

sehingga memiliki keunggulan dalam mengatasi beberapa masalah yang sering muncul dalam analisis regresi biasa. Seperti halnya uji autokorelasi yang tidak perlu dilakukan pada data panel karena autokorelasi hanya terjadi pada data *time series* (Awaludin et al., 2023).

3.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan supaya bisa menguji data yang akan dipakai dalam uji hipotesis, yakni data dari variabel dependen dan variabel independen yang digunakan apakah telah berdistribusi secara normal atau sebaliknya. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji *Jarque-Bera* (J-B). Dapat dikatakan berdistribusi normal jika *statistic Jarque-Bera* nilainya lebih kecil dari nilai *Chi Squares* atau probabilitasnya harus melebihi tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Berikut merupakan formulasi hipotesis uji normalitas:

H_0 = Data terdistribusi normal

H_a = Data tidak terdistribusi normal

Dengan menggunakan taraf signifikan $\alpha = 5\%$ atau 0,05 apabila nilai *Jarque-Bera* (J-B) $< \alpha$ maka menolak H_0 dan terima H_a . Artinya data ini tidak erdistribusi normal. Namun, apabila *Jarque-Bera* (J-B) $> \alpha$ maka terima H_0 menolak H_a . Artinya data ini terdistribusi normal.

3.4.2 Uji Multikolineritas

Menguji adanya multikolineritas antar variabel independen dalam model regresi dilakukan analisis korelasi menggunakan matriks korelasi Pearson. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengukur tingkat hubungan linear antara variabel independen yang terlibat dalam model. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan variabel memiliki nilai koefisien korelasi yang relatif rendah, yaitu di bawah angka 0,8. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang sangat kuat antar variabel independen, sehingga dapat ditarik Kesimpulan jika tidak terdapat indikasi multikolineritas yang serius dalam model.

Apabila ditemukan pasangan variabel dengan nilai korelasi lebih dari 0,8, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap variabel tersebut. Salah satu variabel

dari pasangan yang berkorelasi tinggi dapat dipertimbangkan untuk dihapus, digabung, atau ditransformasi guna mengurangi potensi multikolinearitas yang dapat mengganggu kestabilan model regresi.

Sehingga hipotesis yang dapat dibuat sebagai berikut:

H_0 : terjadi multikolinearitas

H_a : tidak terjadi multikolinearitas

3.4.3 Uji Heteroskeditas

Uji heteroskeditas memiliki tujuan untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu ketidaksamaan varians dari nilai residual dalam model regresi. dalam suatu pengamatan terhadap pengamatan lainnya, maka hal tersebut bisa disebut sebagai homokedastisitas sedangkan apabila terdapat perbedaan akan disebut sebagai heteroskeditas. Dalam model regresi, hasil yang baik ialah apabila terjadi homokedastisitas. Dengan dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas jika nilai signifikan $> 0,05$, kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan $< 0,05$, kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas. Sehingga hipotesisnya sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada masalah heteroskedastisitas

H_a = Ada masalah heteroskedastisitas

3.5 Uji Hipotesis Statistik

3.5.1 Uji t (Uji Parsial)

Selain berfungsi menguji hipotesis, uji t juga digunakan untuk membangun interval kepercayaan. Dengan kata lain, uji t membantu menunjukkan pengaruh antar variabel dengan analisis individu atau parsial terhadap variabel lain, dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%. Untuk itu kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka terima H_0 . Dengan demikian, secara parsial variabel dependen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

- b. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka tolak H_0 . Dengan demikian, secara parsial variabel dependen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Hipotesis Uji T:

- a. Pertumbuhan Ekonomi (PE)
 $H_{01} : \beta_1 \geq 0$, PE tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Papua
 $H_{a1} : \beta_1 < 0$, PE berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Papua
- b. Ketimpangan Pendapatan (KP)
 $H_{02} : \beta_2 \geq 0$, KP tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Papua
 $H_{a2} : \beta_2 < 0$, KP berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Papua
- c. Pendidikan (PD)
 $H_{03} : \beta_3 \geq 0$, PD tidak berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Papua
 $H_{a3} : \beta_3 < 0$, PD berpengaruh negatif terhadap kemiskinan Papua

3.5.2 Uji F (Uji Serentak)

Uji F ini berfungsi untuk menemukan keterkaitan atau hubungan antar dua variabel, yakni variabel independent secara bersamaan terhadap variabel dependen. Untuk itu, berikut kriteria dalam pengambilan keputusan:

- a. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka terima H_0 . Dengan demikian, variabel bebas tidak berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap terikat.
- b. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ Maka tolak H_0 . Dengan demikian, variabel bebas berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap terikat.

Hipotesis Uji F:

- | | |
|--|---|
| $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ | Diduga secara bersamaan tidak ada pengaruh antar semua variabel bebas yang ada terhadap variabel terikat. |
| $H_a : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \neq 0$ | Diduga secara bersamaan ada pengaruh antar semua variabel bebas yang ada terhadap variabel terikat. |

3.5.3 Uji R^2 (Uji Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi R^2 merupakan ukuran yang bisa menunjukkan terkait besaran ragam naik dan turunnya variabel dependen yang dijelaskan melalui pengaruh linear dari variabel independen. Untuk bisa mengetahui hasil dari nilai koefisien determinasi, maka bisa dihitung dengan mengkuadratkan nilai koefisien korelasinya yang dikali dengan 100%. Variasi nilai R^2 adalah 0-1. Semakin tinggi atau semakin mendekati 1 besaran variabel terikat(dependen) yang dijelaskan oleh variabel bebas (independen) dalam suatu analisis regresi linear, artinya semakin baik model tersebut.

Ukuran kesesuaian (*Goodness of fit*) dalam regresi metode kuadrat terkecil (*Least Squared*) bukanlah factor utama dalam menentukan kualitas analisis regresi. Dengan demikian, nilai R^2 tidak secara otomatis mengindikasikan bahwa model tersebut memiliki model yang baik, dan sebaliknya jika R^2 memiliki nilai yang rendah maka bukan berarti model tersebut memberikan hasil yang kurang baik (Gujarati & Porter, 2013).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Didasarkan pada hasil analisis pengaruh antar variabel jumlah penduduk, ketimpangan pendapatan dan pendidikan terhadap kemiskinan di Papua Tahun 2015-2021 dan temuan pada penelitian ini, untuk itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Papua Tahun 2015-2021. Dengan demikian mencerminkan adanya paradoks pertumbuhan yang didorong oleh sektor ekstraktif yang tidak inklusif, dimana manfaat pertumbuhan tidak terdistribusi merata kepada masyarakat lokal.
2. Variabel ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Papua Tahun 2015-2021. Ketimpangan pendapatan bukanlah faktor utama yang menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di wilayah ini karena wilayah Papua masih menggantungkan hidup pada sistem ekonomi subsisten dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem ekonomi formal dan besarnya intervensi pemerintah melalui alokasi dana otonomi khusus dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya berperan dalam menstabilkan tingkat konsumsi rumah tangga miskin.
3. Variabel pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Papua Tahun 2015-2021. Pendidikan membuka lebih banyak peluang ekonomi, meningkatkan keterampilan individu, dan mempermudah akses terhadap kebutuhan dasar serta mendorong terciptanya masyarakat yang bebas dari kemiskinan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan yang ada, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan mampu untuk mengurangi kemiskinan di Papua.

1. Pemerintah daerah perlu mengawasi pembangunan ekonomi secara strategis dengan menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang merata. Pelaksanaan program wajib belajar dua belas Tahun harus disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal. Hal ini penting untuk menciptakan penduduk yang produktif, yang pada akhirnya akan memperbesar peluang masyarakat untuk memperoleh pendapatan layak dan keluar dari jerat kemiskinan.
2. Upaya pengembangan ekonomi dan budaya lokal yang inklusif diperlukan supaya hasil dari tujuan pendidikan dapat terserap secara optimal. Program pelatihan, padat karya, jaminan kesehatan, beasiswa, dan bantuan sosial harus diintegrasikan dengan strategi peningkatan pendapatan, seperti bantuan sarana produksi pertanian, alat tangkap ikan, serta pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kampung.
3. Pemerintah diharapkan mampu memberikan komitmen yang tegas untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan dengan mewujudkan kampung mandiri guna meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Muri Yusuf. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya*. 1(April), 43–50.
- Ansyori, A., & Murwiati, A. (2025). Analisis Kemiskinan di Provinsi-Provinsi Pulau Sumatera : Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengangguran (2018 – 2022). *Economics and Digital Business Review*, 6(1), 653–662.
- Arsyad, L. (2016). Ekonomi Pembangunan. *UPP STIM YKPN*.
- Aswin, D. A., & Yasa, Im. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan, Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 10(11), 4535–4562.
- Awaludin, M., Maryam, S., & Firmansyah, M. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Kecil Dan Menengah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Konstanta*, 2(1), 156–174. <https://doi.org/10.29303/konstanta.v2i1.461>
- Ayudia, N., Ciptawaty, U., Wahyudi, H., Yuliawan, D., & Ratih, A. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan pada Daerah Tertinggal di Pulau Sumatera Berdasarkan Tipologi Klassen. *Journal on Education*, 06(03), 17112–17121.
- Ayunin, K., & Tunjung Hapsari, M. (2023). Pengaruh Pengangguran, Pendidikan,

- Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur Tahun 2002-2021. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(5), 1565–1578.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.853>
- Bappeda Provinsi Papua. (2022). *Analisis Kerangka Pembangunan Provinsi Papua 2021*. 186 pages.
- BPS. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. *Badan Pusat Statistik*, 47, 1–16.
- BPS. (2024). Statistik Demografi Indonesia (Hasil Sensus Penduduk 2020). *Badan Pusat Statistik*.
- BPS. (2025). *Garis Kemiskinan Makanan Provinsi (Rupiah/Kapita/Bulan)*.
- BPS Papua. (2022). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Menurut Lapangan Usaha 2017-2021. In BPS Provinsi Papua (Ed.), *Badan Pusat Statistik Provinsi Papua*.
- BPS Yogyakarta. (2011). *Gini rasio Kota Yogyakarta*. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.
- Endrawati, D., Nujum, S., & Selong, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Rasio Gini dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(3), 20144–20151.
- Finanda, N., & Gunarto, T. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Serta Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. *Jurnal Sosial Sains*, 2(1), 193–202.
<https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i1.324>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. c. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika* (Edisi Keli). Salemba Empat.
- Haerusman, A., & Khoirudin, R. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

- Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2022. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(1), 1–9.
- Handayani, N., & Hanifa, N. (2024). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *INDEPENDENT : Journal Of Economics*, 4(1), 112–124.
- Jamil, N., & Mat, S. H. C. (2019). Realiti Kemiskinan : Satu Kajian Teoritik. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 48(1), 167–177.
- Kementerian ESDM. (2020). *Peluang Investasi Emas-Perak Indonesia*.
- Khadafi, A., Qomariyah, S., & Fajarwati, D. (2025). Perencanaan Wajib Belajar 12 Tahun. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2(1), 91–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/katalis.v2i1.1204>
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, perencanaan, strategis, dan Peluang*. Erlangga.
- Kuznet, S. (1955). Economic growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1). <https://doi.org/10.2307/2118443>
- Lindrianti, N. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Alokasi Dana Dari Pusat Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Di Yogyakarta Tahun 2015-2020. *Skripsi*, 11, 46.
- Perwitasari, I. D., Radjab, M., & Latief, I. (2023). Pengaruh Pendidikan, Pdrb, Dan Gini Ratio Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Selatan. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(2), 223–238.
- Rahmadini, D., Alfidayanti, I., & Haris, M. Al. (2023). Regresi Data Panel untuk Memodelkan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua. *SENADA*, 320–326.
- Rahman, P. A., Firman, & Rusdinal. (2019). Kemiskinan Dalam Prespektif Ilmu Sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3, 1–23.
- Ratih, A., Gunarto, T., & Murwiati, A. (2023). Is Multidimensional Poverty

- Different from Monetary Poverty in Lampung Province? In *International Conference Economics, Business, and Entrepreneur 2022* (Issue 2010). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-064-0>
- Sa'diyah, S. H., & Irham. (2019). *Peran sektor pertanian dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah papua sebelum dan sesudah otonomi khusus*. 27(1).
- Sachs, J. (2005). *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. Penguin Press.
- Sahara, L. (2023). Strategi Pengentasan Kemiskinan: Pendekatan Sosial-Politik Dan Kebijakan Publik. *IMF E Library*, 1–12.
- Saleh, M., & Rizkina, A. (2021). Analisis Pengaruh Gini Ratio Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen – Aceh*, 13(1), 1–4. <https://doi.org/10.51179/eko.v13i1.535>
- Sanggrangbano, A. (2019). Kajian Implementasi Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Dalam Perspektif Ekonomi Kelembagaan Baru (New Institutional Economics). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 1(1), 59–70.
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Tengah. *Equilibrium*, 10(2), 121–130.
- Sarjito, A. (2024). Implikasi Kebijakan Pendidikan dalam Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan. *Journal of Community Services in Humanities and Social Sciences*, 6(2).
- Sembiring, C., Masinambow, V. A. ., & Tumangkeng, S. Y. . (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota-Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2), 25–36.
- Shakira, B. O., Ramadhani, N. A., & Salma, Z. H. (2024). Analisis Infrastruktur

- Jalan dan Pendidikan sebagai Tantangan Demokrasi dan Tata Kelola di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.
- Shi, Z., & Qamruzzaman, M. (2022). Re-Visiting the Role of Education on Poverty Through the Channel of Financial Inclusion : Evidence From Lower-Income and Lower-Middle-Income Countries. *Journal Frontiers in Environmental Science*, 10(May), 1–17.
<https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.873652>
- Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87–103.
- Subianto. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Musi Rawas. *E-Journal Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Sugiastuti, R. H., & Pratama, M. R. (2022). Dampak Buruk Pembangunan Tanpa Pemerataan : Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 16(1), 79–90.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>
- Surbakti, S. P. P., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2021. *Ecoplan*, 6(1), 37–45. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v6i1.631>
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.

- Tampubolon, N., Marampa, M. M., & Bato, M. (2021). Evaluasi Penerapan Konsep Ekowisata di Kampung Wisata Arborek , Raja Ampat. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 5(3), 253–262.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1*. Erlangga.
- Triani, D., & Sitorus, A. (2023). The Influence of Human Development Index , Gini Ratio, Life Expectancy, and Economic Growth on Poverty in Aceh Province 2018-2022. *BICEMBA: 1st Bengkulu International Conference on Economics, Management, Business and Accounting*, 1(1), 64–70.
- Wijayanti, D., Ramadhani, S. N., & Satriowibowo, B. (2024). Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Analisis determinan kemiskinan di Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Ekonomid an Keuangan*, 3(2), 117–123.
<https://doi.org/10.20885/JKEK.vol3.iss2.art1>
- Wulandari, N., Agussalim, A., & Fitrianti, R. (2022). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 2(1), 1–21.
<https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.20913>